

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup merupakan sebuah kondisi aktual secara global tentang terjadinya kerusakan ataupun pencemaran lingkungan akibat dari adanya beragam aktivitas manusia. Peristiwa ini ditandai dengan peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK).¹ Akibat yang ditimbulkan, terjadinya peningkatan radiasi sinar matahari yang terperangkap di atmosfer sehingga berdampak pada kenaikan suhu bumi yang dikenal sebagai pemanasan global.²

Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perubahan pola, intensitas atau pergeseran parameter utama iklim seperti curah hujan, suhu, kelembaban, angin, tutupan awan dan penguapan. Perubahan iklim berdampak pada ekosistem dan manusia di seluruh bagian benua dan samudera di dunia. Perubahan iklim dapat menimbulkan risiko besar bagi Kesehatan manusia, keamanan pangan, dan pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Undang - Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup³. Perubahan iklim merupakan perubahan iklim yang

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2012). Pemanasan Global, Skema Global Dan Implikasinya Bagi Indonesia

² Utina, R. (2015). Pemanasan global: dampak dan upaya meminimalisasinya. Artikel, 1(324).

³ Zuhir, M. A., dkk. (2017). Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Paris 2015; Antara Komitmen Dan Realitas. (Bina Hukum Lingkungan)

diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Dalam hal ini, perubahan iklim dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang akan terjadi di sekitar lingkungan dengan kurun waktu cepat ataupun lambat yang menjadi bagian dan dapat mempengaruhi sumber daya alam.

Pada pasal 63 ayat 1, pemerintah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian dampak perubahan iklim. Kebijakan ini sebagai dasar pemerintah baik pusat maupun daerah untuk berkomitmen dalam menjaga lingkungan dan perubahan iklim. Pasal 70 ayat (3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 membahas tentang peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan begitu permasalahan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa suhu rata-rata Indonesia pada tahun 2019 lebih tinggi 1,2 derajat celsius dibandingkan normalnya yaitu berdasarkan suhu rata-rata Tahun 1981-2000. Hal ini melampaui rata-rata anomali suhu tahun 2018, yaitu sebesar 1 derajat celsius dibandingkan normalnya. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melaporkan bahwa terjadi kecenderungan kenaikan kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan puting beliung. Kejadian bencana hidrometeorologi yang

diperparah dengan faktor antropogenik terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana saat ini tercatat mencapai 98 persen dari seluruh kejadian bencana di Indonesia.⁴

Gambar 1.1

Normal Suhu Rata-rata Bulanan Indonesia 1991-2020 dan Suhu Rata-rata Bulanan Indonesia Hingga Juli 2023



Sumber: <https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-perubahan-iklim> diakses pada Agustus 2023 pukul 08:23 WIB

Berdasarkan data analisis stasiun pengamatan BMKG di atas, suhu udara rata-rata Indonesia bulan Juli 2023 adalah sebesar 26.7 °C . Normal suhu udara klimatologis untuk bulan Juli 2023 periode 1991-2020 di Indonesia adalah sebesar 26.2 °C (dalam kisaran normal 20.08 °C - 28.63 °C). Berdasarkan nilai-nilai tersebut, anomali suhu udara rata-rata pada bulan Juli 2023 menunjukkan anomali positif dengan nilai sebesar 0.5 °C. Anomali suhu udara Indonesia pada bulan Juli 2023 ini merupakan nilai anomali tertinggi ke-4 sepanjang periode pengamatan sejak 1981.

⁴ Road Map Program Kampung Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2017

Akibat yang ditimbulkan, terjadinya peningkatan radiasi sinar matahari yang terperangkap di atmosfer sehingga berdampak pada kenaikan suhu bumi yang dikenal sebagai pemanasan global.⁵ Melihat data tersebut, kenaikan suhu bumi yang semakin meningkat akan berdampak terhadap ancaman terjadinya bencana yang berhubungan dengan perubahan iklim. Berikut dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim tersebut antara lain:

1. Semakin banyak penyakit (Tifus, Malaria, Demam, dll.)
2. Meningkatnya frekuensi bencana alam/cuaca ekstrem (tanah longsor, banjir, kekeringan, badai tropis, dll.)
3. Pergeseran musim dan perubahan pola hujan
4. Menurunnya produktivitas pertanian
5. Meningkatnya temperatur yang akan mengakibatkan kebakaran hutan
6. Terancamnya keanekaragaman hayati
7. Kenaikan muka laut yang menyebabkan banjir permanen dan kerusakan infrastruktur di daerah pantai.⁶

Dengan kondisi tersebut maka upaya adaptasi dan mitigasi menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan guna menghindari bencana dan kerugian yang lebih parah akibat terjadinya perubahan iklim. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap

⁵ Utina, R. 2015. Pemanasan global: dampak dan upaya meminimalisasinya. Artikel, 1(324).

⁶ Armi Susandi, Indriani Herlianti, Mamad Tamamudin, Irma Nurlaela, "Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ketinggian Muka Laut di Wilayah Banjarmasin", dimuat dalam *Jurnal Ekonomi Lingkungan* Vol. 12, No.2, tahun 2008, hlm. 2.

dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Upaya adaptasi dan mitigasi merupakan paket utuh pengendalian perubahan iklim yang harus dilaksanakan secara bersama-sama untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi.

Indonesia bersama dengan negara-negara lain di dunia telah menetapkan komitmen untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global tidak lebih dari 2°C, di atas tingkat pada masa pra industrialisasi, dengan ambisi lebih lanjut untuk menekan kenaikan suhu sebesar 1,5°C seperti tertuang dalam Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) yang disahkan di Paris pada tahun 2015. Kesepakatan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan aksi nyata yang melibatkan seluruh elemen para pemangku kepentingan. Ditegaskan dalam Kesepakatan Paris bahwa gaya hidup dan pola konsumsi-produksi berkelanjutan memegang peranan penting dalam penanganan perubahan iklim.⁷

Salah satu strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam upaya pengendalian perubahan iklim adalah dengan mendorong kerja sama multi-pihak untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di

⁷ Road Map Program Kampung Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2017

tingkat tapak berbasis komunitas melalui pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim).

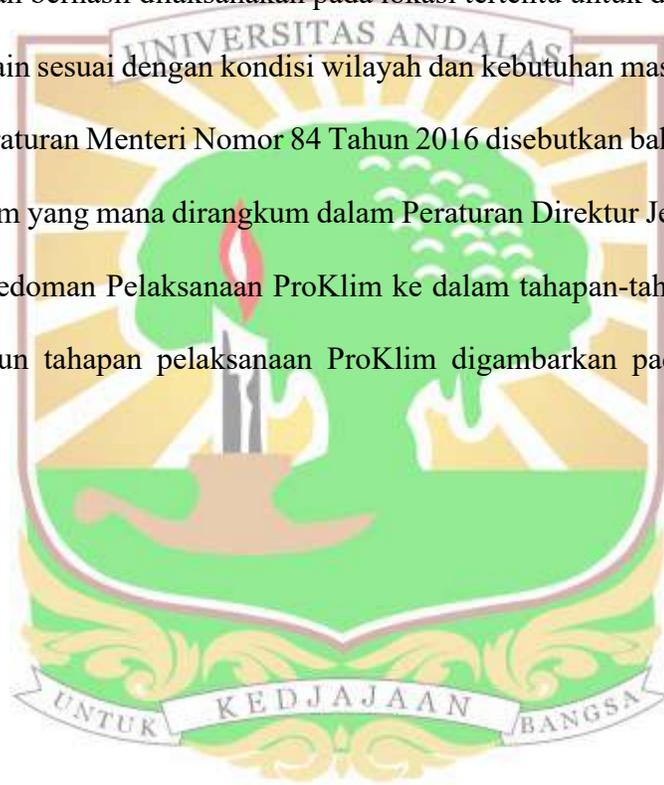
Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Pelaksanaan ProKlim mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim. Kemudian untuk pedoman pelaksanaan diatur dalam Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim. Tujuan utama ProKlim adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan dan mendorong pelaksanaan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK. Tujuan khusus dari ProKlim adalah:

- a. Mendorong kelompok masyarakat melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.
- b. Memberikan pengakuan terhadap aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal yang telah dilakukan kelompok masyarakat.

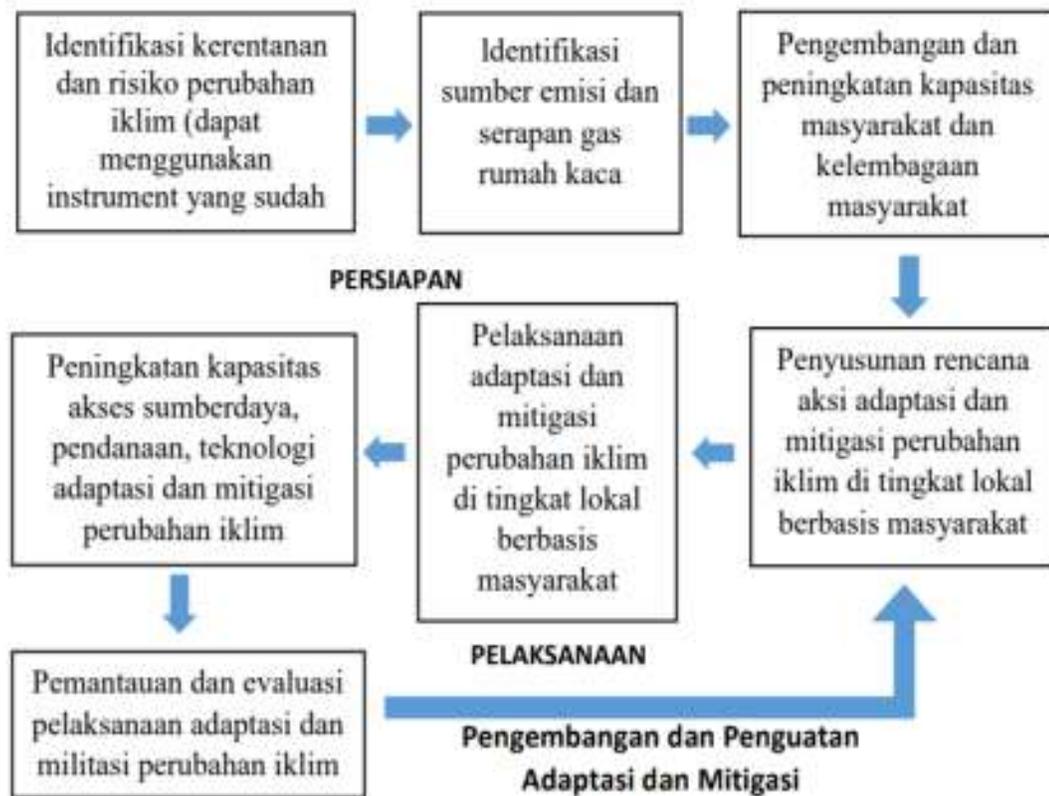
- c. Memberikan pengakuan terhadap pemerintah daerah dalam penguatan pelaksanaan ProKlim.
- d. Memberikan pengakuan terhadap pendukung dalam rangka fasilitasi pembentukan dan pengembangan ProKlim
- e. Mendorong penyebarluasan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah berhasil dilaksanakan pada lokasi tertentu untuk dapat diterapkan di daerah lain sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pada Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2016 disebutkan bahwa terdapat tujuh kegiatan ProKlim yang mana dirangkum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perubahan Iklim tentang Pedoman Pelaksanaan ProKlim ke dalam tahapan-tahapan pelaksanaan ProKlim. Adapun tahapan pelaksanaan ProKlim digambarkan pada bagan sebagai berikut:



Gambar 1.2

Tahapan Pelaksanaan ProKlim



Sumber: Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim

Berdasarkan Gambar 1.2, terdapat empat tahapan dalam pelaksanaan ProKlim yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengembangan dan penguatan adaptasi dan mitigasi. Tahapan ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim ke dalam kegiatan ProKlim dan dijabarkan pada Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim tentang Pedoman Pelaksanaan ProKlim, tahapan ini menjadi arahan dan pedoman bagi pelaksanaan Program kampung iklim.

Di era sekarang ini perlindungan dan pengelolaan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah di bawah pemerintahan pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Indonesia memperkuat komitmen dalam menghadapi perubahan iklim melalui salah satu program sebagai bentuk gerakan nasional pengendalian perubahan iklim yaitu Program Kampung Iklim (ProKlim)⁸.

Wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi secara berkesinambungan disebut dengan lokasi kampung iklim. Kampung dalam hal ini adalah wilayah administratif yang terdiri atas rukun warga, dusun atau dukuh, kelurahan atau desa, dan wilayah administratif lain yang dipersamakan dengan itu. Penetapan kampung iklim ini melalui serangkaian proses penilaian atas pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Direktorat Jenderal Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan penambahan 5.000 lokasi kampung iklim pada tahun 2022. Dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2021 yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Kamis, Direktur Jenderal Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi mengatakan bahwa pencapaian target itu akan membutuhkan kolaborasi dari banyak pihak. Menurut data KLHK, Program Kampung iklim hingga tahun 2021 baru dilaksanakan di 3.270

⁸ Puspito, A. I. (2016). Implementasi Program Kampung Iklim Di Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2016 (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).

desa/kelurahan yang ada di Indonesia. Pemerintah menargetkan program tersebut bisa mencakup 20.000 desa/kelurahan pada tahun 2024.⁹

ProKlim telah dilaksanakan oleh hampir semua pemerintah daerah seluruh Indonesia, salah satunya Provinsi Sumatera Barat dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 660/01/SE/DLH-2018 tentang Pembentukan Kampung Iklim (ProKlim) pada wilayah Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Sumatera Barat. Sebanyak 34 kampung iklim Provinsi Sumatera Barat telah terdaftar di Sistem Registrasi Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2020 dan 2021. Adapun rincian usulannya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Lokasi ProKlim Tahun 2020 dan 2021 Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Lokasi Usulan	Alamat	Kab/Kota
1	Jor. Piruko Tengah Nagari Sitiung	Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya	Kab. Dharmasraya
2	Jor. Koto Hilalang Nagari Sungai Langkok	Kec. Tiumang Kab. Dharmasraya	Kab. Dharmasraya
3	Jor. Ganting Nagari Sirukam	Kec. Payung Sekaki Kab. Solok	Kab. Solok
4	Jor. Tabek Nagari Talang babungo	Kec. Hiliran Gumanti Kab. Solok	Kab. Solok
5	Jor. Dahlia Nagari Lubuk Jantan	Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar	Kab. Tanah Datar
6	Jor. Koto Laweh Nagari Tanjung Alam	Kec. Tanjung Baru Kab. Tanah Datar	Kab. Tanah Datar
7	Jor. Tanjung Harapan Nagari Palangki	Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung	Kab. Sijunjung

⁹ PPID.KLHK (2020). KLHK Memberikan penghargaan ProKlim tahun 2020 (Jakarta, KLHK)

8	Jor. Koto Baru Nagari Tanjung Bonai Aur	Kec. Sumur Kudus Kab. Sijunjung	Kab. Sijunjung
9	RT. 2, 6, 9, 10 Kelurahan Ekor Lubuk	Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang	Kota Padang Panjang
10	RT. 8, 10, 11, 12 Kelurahan Pasar Usang	Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang	Kota Padang Panjang
11	Kor. Koto Tinggi Nagari Gunung Padang Alai	Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman	Kab. Padang Pariaman
12	Kor. Ringan Ringan Nagari Pakandangan	Kec. Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman	Kab. Padang Pariaman
13	Jor. Padang Japang Nagari VII Koto Talago	Kec. Guguk Kab. 50 Kota	Kab. Limapuluh Kota
14	RW 02 Kelurahan Kubu Gulai Bancah	Kec. Mandiangin Koto Selayar Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi
15	RW 02 Kelurahan Kototuo Limo Kampung	Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh
16	Kp. Laban Nagari Salido	Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan
17	Kp. Alai Nagari Limau Gadang Lumpo	Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan
18	Jorong Padang Galanggang Nagari Matua Mudiak	Kec. Matur Kab. Agam	Kab. Agam
19	Jorong Tanjung Alam Nagari Kumanis	Kec. Sumpur Kudus Kab. Sijunjung	Kab. Sijunjung
20	Jorong Bukit Buar Nagari Paru	Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung	Kab. Sijunjung
21	Jorong Koto Nagari Guguak	Kec. Koto VII Kab. Sijunjung	Kab. Sijunjung
22	Korong Matua Nagari Sikucua	Kec. V Koto Kampung Dalam	Kab. Padang Pariaman

23	Jorong Pagu-Pagu Nagari Pandai Sikek	Kec. X Koto Kab. Tanah Datar	Kab. Tanah Datar
24	Jorong Baringin Nagari Batu Taba	Kec. Batipuh Selatan Kab. Tanah Datar	Kab. Tanah Datar
25	Kampung Salido Kecil Nagari Salido Sari Bulan	Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan
26	RT. 3, 5, 6, 8 Kelurahan Bukit Surungan	Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang	Kota Padang Panjang
27	Dusun Kajai Desa Kajai	Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman	Kota Pariaman
28	RW. 06 Kelurahan Kuranji	Kec. Kuranji Kota Padang	Kota Padang
29	Jorong Ganting Nagari Sirukam	Kec. Payung Sekaki Kab. Solok	Kab. Solok
30	Jor. Karya Muda Timur Nagari Sungai Duo	Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya	Kab. Dharmasraya
31	Jorong Kampung Tengah Nagari Simalidu	Kec. Koto Salak Kab. Dharmasraya	Kab. Dharmasraya
32	RW. 3 Ngarai Saiyo Kelurahan Kayu Kubu	Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi
33	RW. 01 Kelurahan Parit Antang	Kec. Aua Birugo Tiga Baleh Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi
34	Jor. Padang Japang Nagari VII Koto Talago	Kec. Guguak Kab. 50 Kota	Kab. Limapuluh Kota

Sumber: Sistem Registrasi Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 dan 2021

Berdasarkan Tabel 1.1, sejauh ini jumlah lokasi ProKlim Provinsi Sumatera Barat sudah mencapai 34 lokasi pada tahun 2020 dan 2021. Kabupaten/Kota mengirimkan dua hingga lima lokasi usulan ProKlim, tetapi untuk Kota Padang, Kota Pariaman, Kab.Agam, dan Kota Payakumbuh hanya mengirimkan masing-masing Satu Lokasi usulan ProKlim. ProKlim dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang hanya memiliki satu lokasi usulan ProKlim. Berdasarkan

surat edaran Walikota Padang No.660/08.40/DLH-2022 tentang Program Kampung Iklim, pemerintah Kota Padang sudah meminta kepada seluruh Camat se-Kota Padang untuk berpartisipasi dan mendukung program kampung iklim dengan memfasilitasi serta melakukan pembinaan kelompok yang telah ada. Dilihat dari persentase usulan dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Kota Padang mengirimkan satu kelurahan sebagai lokasi ProKlim dari 104 kelurahan yang ada di Kota Padang,:

“...Jumlah lokasi ProKlim di Kota Padang sejak adanya pengusulan lokasi ProKlim yang di laksanakan tersebut, memang benar untuk Kota Padang sampai pendataan tahun 2021 sekarang kita hanya ada satu lokasi ProKlim yaitu di Kelurahan Kuranji RW.06 yang dikenal dengan Lubuk Tempurung Indah”.¹⁰

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, terlihat jelas untuk Kota Padang masih mempunyai satu lokasi ProKlim, di mana lokasi ProKlim inilah yang menjadi perwakilan lokasi ProKlim untuk Kota Padang, dibandingkan dengan Nagari/Kelurahan lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang dapat dikatakan memiliki partisipasi yang rendah untuk ikut melaksanakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hal ini juga terlihat dengan adanya permasalahan perubahan iklim yang menyebabkan Kota Padang menjadi perhatian khusus terkait kondisi kerusakan sepanjang bibir pantai Kota Padang akibat dari adanya abrasi laut yang menyebabkan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Junaidi, Staf seksi pemeliharaan lingkungan Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 22 november 2021

banyaknya terjadi kerusakan di sepanjang garis pantai Kota Padang. Salah satunya yaitu Kawasan tugu merpati:¹¹

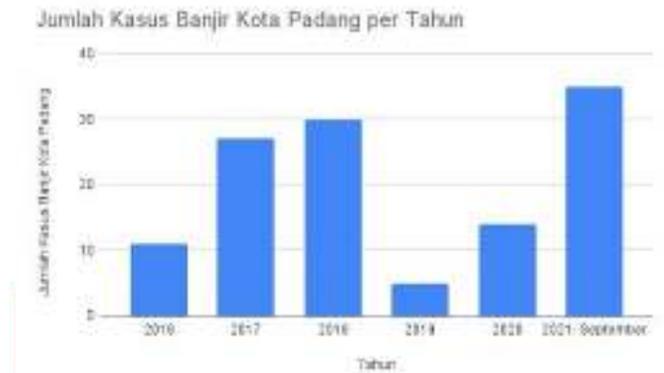
Gambar 1.3

Monumen Merpati Perdamaian Tergerus Abrasi



Berdasarkan gambar 1.3 di atas, terlihat abrasi pantai yang terjadi di Kota Padang Harus mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Kota Padang. Tidak hanya abrasi, kejadian banjir di Kota Padang cenderung naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 ada 11 kasus banjir, pada tahun 2017 ada 27 kejadian banjir lalu pada tahun 2018 naik menjadi 30 kejadian banjir. Pada tahun 2019 turun menjadi 5 kejadian dan pada tahun 2020 naik Kembali menjadi 14 kasus, bahkan pada tahun 2021 sampai September sudah 35 kejadian banjir.

¹¹ Dokumentasi dari DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat,2023

Gambar 1.4**Jumlah kasus banjir Kota Padang per tahun**

Sumber : Data BMKG Kota Padang

Banjir yang sering terjadi ini juga membutuhkan perhatian khusus oleh pemerintah Kota Padang, banjir yang berulang ini sering menjadi masalah dan merugikan masyarakat, banyaknya fasilitas dan rumah-rumah masyarakat yang terendam dan menyebabkan banyaknya kerusakan. berikut dokumentasi salah satu lokasi banjir di Kota Padang :

Gambar 1.5**Warga Jondul Rawang menyirami lumpur bekas banjir di jalan Utama**

Sumber : Dokumentasi Liputan Khusus Bencana Alam, 2021

Permasalahan tersebut menjadi salah satu alasan kuat Kota Padang untuk konsisten dalam melaksanakan ProKlim dilihat dari jumlah lokasi ProKlim yang diusulkan bertambah pada tahun-tahun terakhir ini. Hal tersebut dapat dilihat pada Tahun 2021 terdapat satu lokasi ProKlim di Kota Padang yaitu di RW.06 Kelurahan Kuranji. Kemudian pada tahun 2022 bertambah dua lokasi yaitu Kelurahan Pasie Nan Tigo dan Kelurahan Pengambiran. Lalu pada Tahun 2023 lokasi ProKlim Kota Padang bertambah lagi tiga lokasi yaitu pada Kelurahan Batipuh Panjang, Kelurahan Lambung Bukit dan Kelurahan Limau Manis Selatan sehingga menjadi 6 lokasi ProKlim pada tahun 2023.

Pelaksanaan ProKlim di Kota Padang sampai pada tahun 2023 dilakukan di enam kelurahan. Lokasi tersebut berada pada empat Kecamatan di Kota Padang yaitu Kecamatan Kuranji, Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Pauh. Sebagaimana hasil wawancara dengan Reni Apriani, staf kelompok jabatan fungsional sub-substansi program, data dan sistem informasi lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, sebagai berikut:

“Kami selaku pemerintah Kota Padang selalu berupaya untuk mengirimkan sebanyak mungkin lokasi usulan program kampung iklim ini per tahunnya. Hal ini dapat dilihat telah diusulkannya dua Kelurahan di Tahun 2022 dan kemudian diusulkan lagi tiga kelurahan pada tahun 2023 ini.”¹²

¹² Hasil Wawancara dengan Reni Apriani Staf Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Data dan Sistem Informasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, pada tanggal 22 November 2023

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, terlihat adanya keseriusan dari pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan jumlah lokasi-lokasi ProKlim dengan melakukan mengusulkan lokasi kampung iklim yang diusulkan dari tahun ke- tahun.

Selain itu, Kota Padang telah mendapatkan penghargaan ProKlim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021 yang diserahkan kepada ketua kelompok ProKlim. Hal ini juga disampaikan oleh kepala seksi pemeliharaan lingkungan, bidang tata lingkungan provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai berikut:

“...Lokasi ProKlim Lubuk Tempurung Indah Kuranji bahkan sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai apresiasi wujud kepedulian dalam membina dan melestarikan lingkungan pada lomba kelompok ProKlim se-Indonesia itu pada tahun 2021”.¹³

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa Lokasi ProKlim Kota Padang bisa mendapatkan penghargaan langsung dari kementerian LHK dan selain itu tentunya manfaat yang lebih penting adalah keberhasilan menjaga lingkungan dan bisa melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim pada tingkat tapak. Sebagai mana termuat dalam berita berikut:¹⁴

¹³ Hasil Wawancara dengan Devi Hendra selaku kepala seksi pemeliharaan lingkungan, Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 22 November 2021

¹⁴ Padang.go.id, Kota Padang terima penghargaan ProKlim dari Kementerian LHK RI. Diakses pada <https://padang.go.id/kota-padang-terima-penghargaan-ProKlim-dari-kementerian-lhk-ri>, diakses pada 07 April 2023

“Pemerintah Kota Padang kembali menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI. Kali ini penghargaan Program Kampung Iklim (ProKlim). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar secara virtual kepada Walikota Padang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang Mairizon, Selasa (19/10/2021). Adapun 2 kategori penghargaan yang diraih Kota Padang yaitu Kategori Apresiasi Pembinaan ProKlim Tingkat Kabupaten/Kota dan Sertifikat ProKlim Utama untuk RW 6 Kelurahan Kuranji.”

Berikut penyerahan sertifikat penghargaan ProKlim Utama oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang kepada ketua kelompok ProKlim Lubuk Tempurung Indah:



Gambar 1.6

Penyerahan sertifikat penghargaan ProKlim Lubuk Tempurung Indah

Sumber : Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2022

Persoalan mitigasi perubahan iklim merupakan salah satu isu global Kota Padang yang terdapat di dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 dengan tujuan mengambil Tindakan akan perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan. Dalam pelaksanaan ProKlim di Kota Padang, pemerintah Kota Padang terutama Dinas

Lingkungan Hidup menyambut dan menerima dengan adanya program ini. Hal ini juga dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut:¹⁵

“program kampung iklim ini menjadi isu global pada saat sekarang ini, sehingga permasalahan ini menjadi perhatian khusus oleh pemerintah, Tentunya kami menyambut dengan baik adanya program ini. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan membahas perubahan iklim ke dalam RPJMD tahun 2019-2024”



Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pemerintah dalam pelaksanaan ProKlim menerima dan menyambut program ini dengan baik di Kota Padang. Kemudian dengan menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No 660/01/SE/DLH-2018 tentang Pembentukan Kampung Iklim (ProKlim) pada Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi kampung iklim dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan memberikan formulir kepada setiap kelurahan yang ada di Kota Padang. Formulir tersebut berisi komponen kegiatan adaptasi dan mitigasi yang telah dilakukan oleh masing-masing kelurahan. Dari komponen tersebut ditentukan kelurahan yang melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi terbaik serta dengan adanya kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan tersebut seperti kelompok bank sampah, kelompok tani dan kelompok usaha bersama. Lokasi yang terpilih dijadikan sebagai usulan lokasi kampung iklim (ProKlim), hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Reni Apriani Staf Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Data dan Sistem Informasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, pada tanggal 22 November 2023

“untuk penentuan lokasinya kita menunjuk satu orang sebagai enumerator yang didampingi oleh pihak kelurahan. Kami memberikan formulir yang harus diisi kemudian biasanya pihak kelurahan membantu memberikan kepada kelompok masyarakat untuk mengisi formulir dan biasanya suatu lokasi ProKlim harus memiliki kelompok yang mendukung kegiatan ProKlim.”¹⁶

Penentuan lokasi kampung iklim di Kota Padang berdasarkan nilai dari formulir yang diisi oleh suatu kelompok masyarakat dengan dibantu oleh satu personel yang disebut dengan Enumerator sebagaimana yang terdapat dalam Pengantar Pelaksanaan Pengumpulan dan Pencatatan Data Calon Lokasi ProKlim Nomor S.90/BPPI-SUM/JF/PPI.0/3/2023, di mana Enumerator dapat berasal dari fungsional penyuluh, fungsional polhut, pendamping desa, pendamping perhutanan sosial, dan lain-lain yang telah mendapatkan bimbingan teknis atau pelatihan tentang ProKlim.

Tabel 1.2
Lokasi ProKlim Kota Padang Tahun 2023

No	Lokasi	Tahun	Enumerator	Instansi
1.	RW 06 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang	2019	Fauziah Fitri Handayani	Dinas Lingkungan Hidup Kota
2.	RW 07 Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang	2022	Hanif salmizah rafi	Dinas Lingkungan Hidup Kota
3.	RW 09 Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lubuk Begalung	2022	Elvandri	Dinas Lingkungan Hidup Kota

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Reni Apriani Staf Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Data dan Sistem Informasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, pada tanggal 22 November 2023

4.	RW 03 Kelurahan Lambung, Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang	2023	Elvandri	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
5.	RW 06 Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang	2023	Fauziah Fitri Handayani	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
6.	RW 12 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang	2023	Pradina Ayusma Rosa	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Sumber : Lapid tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Pada tahun 2023 terdapat penambahan 5 lokasi ProKlim yang sudah dapat dinyatakan sebagai ProKlim tetapi lokasi-lokasi ini belum diresmikan oleh Kota Padang. Lokasi-lokasi ProKlim ini sudah dinilai oleh Enumator dan sudah memenuhi standar sebagai lokasi ProKlim, dengan demikian Lokasi Prokolim sudah bertambah yang pada awalnya Kota Padang hanya memiliki 1 lokasi tetapi pada tahun 2023 Kota Padang telah memiliki 6 lokasi ProKlim.

Pemerintah Kota Padang di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang bertindak sebagai Pembina dari pelaksanaan ProKlim dengan adanya tim yang berisi lintas sektoral di mana terdapat beberapa OPD lain yang masuk ke dalam tim. Kegiatan pembinaan merupakan upaya peningkatan kapasitas berbagai pihak untuk mendukung pembentukan dan pelaksanaan ProKlim dalam meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ditingkat lokal. Di mana kegiatan pembinaan yang dimaksud

yaitu a) sosialisasi, b) penyuluhan, c) peningkatan kapasitas, d) pendampingan, e) bimbingan teknis, f) fasilitasi pelaksanaan dan g) pembangunan bank data ProKlim.¹⁷

Tim Pembina memiliki peran sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan pada lokasi kampung iklim.
2. Mengumpulkan data adaptasi, mitigasi terhadap perubahan iklim pada lokasi yang diusulkan.
3. Merekomendasikan lokasi kampung iklim.

Setelah melihat situasi yang ada pihak Dinas Lingkungan Hidup telah merancang tindakan apa yang harus dilakukan ke depannya. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang ialah dengan dibentuknya beberapa strategi dalam pelaksanaan Program kampung iklim yang terdapat dalam laporan tahunan ProKlim dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 yang masih digunakan hingga saat ini yaitu pada tahun 2024. Sebagaimana pada hasil wawancara berikut:

“untuk strategi program kampung iklim pemerintahan Kota Padang tidak memiliki strategi dalam bentuk kebijakan ataupun undang-undang, tetapi DLH Kota Padang mengutip beberapa poin yang tertuang dalam Laporan Tahunan ProKlim DLH Provinsi, di mana strategi yang kami gunakan selain untuk meningkatkan ProKlim tetapi juga lebih fokus untuk penambahan lokasi ProKlim di Kota Padang”¹⁸

¹⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Reni Apriani Staf Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Data dan Sistem Informasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, pada tanggal 22 November 2023

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa strategi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dikutip dari Laporan Tahunan ProKlim Provinsi Sumbar dengan memfokuskan strategi peningkatan jumlah lokasi-lokasi ProKlim di Kota Padang berdasarkan yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 660/01/SE/DLH-2018 tentang Pembentukan Kampung Iklim pada Wilayah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Sumatera Barat. Adapun strategi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
2. Memberi pembinaan kepada masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat
3. Menjalin kerja sama dengan beberapa *stakeholder*

Berdasarkan strategi di atas, maka dapat dilihat Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memiliki beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan program kampung iklim yang ada di Kota Padang dengan menggunakan strategi yang tertuang di dalam laporan tahunan ProKlim tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Sebagaimana peran yang dimiliki oleh Tim Pembina, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melalui Tim Pembina kemudian memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman Tim Pembina dan kelompok masyarakat tentang Program Kampung Iklim. Pada tahapan ini Kota Padang mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Program Kampung Iklim. Surat edaran ini dikeluarkan untuk memberikan

penguatan pelaksanaan ProKlim di Kota Padang. Tim Pembina sesuai dengan tugasnya melakukan pembinaan dalam bentuk sosialisasi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut:¹⁹

“kegiatan pembinaan yang kami lakukan berupa sosialisasi. Kami lumayan sudah banyak melakukan sosialisasi tetapi sosialisasi ini tidak diagendakan apa saja dan kapan saja dilakukan jadi dapat dikatakan berjalan begitu saja. Karena sosialisasi ini dilakukan sekalian untuk survei lapangan ke lokasi-lokasi ProKlim”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang selaku Tim Pembina telah melakukan sosialisasi kepada kelompok masyarakat. Pembinaan berupa sosialisasi ini merupakan bagian dari pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat pada tahap perencanaan. Akan tetapi kekurangannya terdapat pada setiap kegiatan sosialisasi tidak dilakukan pencatatan agenda sehingga tidak adanya kejelasan untuk waktu pelaksanaan.

“sosialisasi yang diberikan biasanya dilakukan pada lokasi-lokasi ProKlim yang sudah ada, dan untuk lokasi-lokasi usulan ProKlim biasanya kami mengundang kelompok masyarakatnya untuk datang dan mengikuti sosialisasi tersebut, akan tetapi karena banyaknya kesibukan yang berbeda-beda dan susahny menyatukan waktu, biasanya hanya beberapa orang saja perwakilan dari kelompok usulan ProKlim yang hadir”²⁰

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Reni Apriani Staf Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Data dan Sistem Informasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, pada tanggal 22 November 2023

²⁰ Hasil Wawancara dengan Reni Apriani Staf Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Data dan Sistem Informasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, pada tanggal 22 November 2023

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sudah berjalan dengan baik tetapi adanya kendala di mana kelompok masyarakat yang hadir untuk usulan lokasi ProKlim masih kurang, yang disebabkan oleh tidak cocoknya waktu bahkan hal yang lainnya, sehingga saat melakukan sosialisasi masih banyak kelompok masyarakat yang kurang paham mengenai Program Kampung Iklim.

Bersamaan dengan sosialisasi tersebut, kegiatan adaptasi dan mitigasi yang telah diisikan oleh kelurahan terpilih juga dipantau oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tujuannya, untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi nyata dari tempat dan kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing kelurahan. Kemudian, item tersebut digunakan untuk pendaftaran lokasi ProKlim ke dalam Sistem Registri Nasional (SRN) di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

“selain kelurahan kami juga bekerja sama dengan Dinas pertanian di mana Dinas Pertanian di sini menjadi pendamping atau penyuluh pada lapangan/lokasi-lokasi ProKlim, karena pada setiap kelurahan pastinya memiliki pertanian, sehingga dengan adanya Dinas Pertanian dapat lebih membantu.”²¹

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dijelaskan bahwa adanya koordinasi antara instansi lain yaitu Dinas Pertanian. Dinas Pertanian ikut serta dalam melakukan penyuluhan dan menjadi pendamping pada lokasi ProKlim. Selain itu Dinas

²¹ Hasil wawancara dengan Fauziah, anggota tim Pembina ProKlim, Dinas lingkungan hidup kota padang, pada tanggal 22 Mei 2024

Lingkungan Hidup Kota Padang juga adanya kerja sama dengan *stakeholder* lain, sebagaimana dijelaskan pada kutipan wawancara berikut:²²

“*stakeholder* lain yang ikut berpartisipasi dalam ProKlim Kota Padang salah satunya yaitu dari CSR Perusahaan Pelindo, di mana CSR perusahaan ini memberikan bantuan seperti bibit yang kemudian dapat dibagi-bagikan kepada lokasi ProKlim, selain itu juga dapat menutupi anggaran yang kurang”

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan ProKlim Kota Padang masih memiliki kendala pada anggaran, di mana anggaran yang di dapat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang masih sangat kurang dan tidak dapat mencukupi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ProKlim, sebagaimana hasil wawancara berikut:

“realitanya mungkin belum semuanya kegiatan ProKlim dapat dilaksanakan karena kami terhalang pada anggaran, anggaran ProKlim berasal dari APBD Kota Padang serta dari DLH Provinsi Sumatera Barat, tetapi itu semua tidak menentu berbeda-beda setiap dapatnya, cara lain untuk mendapatkan anggaran yaitu dengan bekerja sama dengan *stakeholder* lain dan CSR perusahaan yang telah disebutkan tadi”

Berdasarkan wawancara tersebut menegaskan bahwa pendapatan anggaran untuk ProKlim oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang masih sangat minim, menyebabkan terhalangnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan ProKlim yang seharusnya bisa di selenggarakan dalam kurun waktu terakhir, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melakukan upaya dengan bekerja sama dengan CSR Perusahaan yang ada di Kota Padang.

²² Hasil Wawancara dengan Reni Apriani Staf Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Data dan Sistem Informasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, pada tanggal 22 November 2023

Target yang sudah ditentukan oleh KLHK menargetkan Kampung Iklim hingga tahun 2024 sebanyak 20.000 lokasi Kampung Iklim di desa/kelurahan. Sejak tahun 2013 Sumatera Barat telah mulai berpartisipasi dalam program kampung iklim dan memiliki target 290 Kampung Iklim pada tahun 2024, tetapi hingga tahun 2023 Sumatera Barat hanya memiliki 155 lokasi ProKlim. Dengan melihat jumlah lokasi ProKlim yang ada di Kota Padang saat ini masih jauh untuk membantu Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai target yang diharapkan, bagaimana disampaikan oleh Reni Apriani Staf Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Data dan Sistem Informasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, sebagai berikut:

“...Kalau dari segi lokasi ProKlim, Kota Padang sangat minim partisipasi terutama dari masyarakat untuk mengikuti program kementerian ini. Sumatera Barat sudah ikut partisipasi sejak tahun 2013 tetapi sampai sekarang Kota Padang memiliki enam lokasi ProKlim. Sedangkan target yang harus dicapai dari Provinsi Sumatera Barat adalah 290 lokasi”.²³

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan program kampung iklim masih banyak memiliki kekurangan yang harus diatasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat serta adanya dampak perubahan iklim yang saat ini masih berlangsung dan

²³ Hasil Wawancara dengan Reni Apriani Staf Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Data dan Sistem Informasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, pada tanggal 22 November 2023

belum meratanya upaya adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang beserta fenomena yang telah peneliti paparkan, peneliti berkeinginan dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang”. untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait strategi program kampung iklim oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dengan menggunakan teori inti strategi yang dikemukakan oleh Richard P. Rumelt.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi yang telah dijabarkan di latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Program Kampung Iklim Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang strategi Program Kampung Iklim yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai Strategi Program kampung iklim (ProKlim) yang dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data rujukan serta informasi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penambahan wawasan ataupun pengetahuan yang dimiliki peneliti terkait keilmuan administrasi publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian mengenai strategi program kampung iklim oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang ini diharapkan peneliti untuk dapat dijadikan sebagai rekomendasi, bahan masukan maupun sumbangan pemikiran yang mampu membantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam melakukan pelaksanaan program kampung iklim ke depannya.

